BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi membawa dunia dalam era komputerisasi yang memudahkan kita dalam mengolah data. Hal ini menjawab keraguan kita atas kemampuan manusia untuk mengolah data dengan baik, sehingga fungsi dan efisiensi hasil pengolahaan data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Akan tetapi, semua perangkat yang mendukung hal tersebut tidak akan bekerja secara optimal, jika tidak ditunjang dengan sistem informasi yang baik. Dengan kata lain, arus data yang terjadi dalam sistem informasi harus dirancang dengan baik. Dalam hal ini, komputerisasi berperan penting sebagai pusat penyimpanan data dari sistem tersebut. Penggunaan komputer dapat dijadikan alat untuk mencapai tujuan, mencari kemudahan dan kecepatan dalam melakukan suatu proses pekerjaan terutama yang melibatkan banyak data. Sistem komputer sangat membantu dalam pemecahan permasalahan terutama dalam hal pengolahan data agar di dapatkan informasi yang akurat cepat dan relevan.

Teknologi informasi ini dapat melayani segala bentuk kebutuhan yang berbeda karena layanan yang lebih baik dari Pemerintah kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah, peningkatan interaksi antara Pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah melalui akses informasi, hingga efisiensi manajemen pemerintahan. Hasil yang akan dapat dilihat dari penggunaan Teknologi Informasi (TI) adalah efisiensi biaya, meningkatkan efektifitas dan transparansi, serta akuntabilitas. Informasi sangat dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan yang baik dan tepat perlu didukung oleh ketersediaan informasi yang akurat, cepat dan cukup. Dengan informasi yang demikian, pimpinan suatu lembaga/organisasi dapat gambaran yang komplek dan spesifik dari suatu keputusan yang akan dirumuskan. Keputusan pun akan efisien dari aspek waktu karena data dapat diakses secara instan.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Gubernur Jawa Barat dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah, pada saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang mengembangkan teknologi inforasi dan mengimplementasikan secara bertahap di setiap Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat khususnya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah bidang kepegawaian berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang salah satunya memiliki fungsi pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi serta pengolahan data perpindahan dan administrasi kepegawaian.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Kepala Badan sebagai pejabat eselon II yang diberikan wewenang oleh Gubernur Jawa Barat untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Badan membagi tugas teknisnya ke masing-masing bidang yang dipimpin oleh pejabat eselon III yaitu Kepala Bidang. Untuk pelaksanaan fasilitasi perpindahan dan administrasi kepegawaian serta pengolahan data perpindahan dan administrasi kepegawaian ditangani oleh Bidang Mutasi dan Administrasi Kepegawaian khususnya sub bidang Perpindahan dan Administrasi Kepegawaian yang dipimpin oleh pejabat eselon IV.

Sub bidang Perpindahan dan Administrasi Kepegawaian memiliki tugas yang salah satunya adalah melaksanakan pengelolaan perpindahan PNS dari Kabupaten/Kota ke Provinsi atau dari Provinsi ke Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, perpindahan PNS antar Daerah antar Provinsi, perpindahan PNS Pusat ke Daerah dan atau sebaliknya dan Perpindahan pegawai di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Fasilitasi perpindahan dan administrasi kepegawaian serta pengolahan data perpindahan dan administrasi kepegawaian terdapat 4 (empat) porduk yang dihasilkan yaitu surat Penawaran, surat Persetujuan Pindah Bekerja, surat Penetapan Pindah Bekerja dan Keputusan Gubernur Tentang Perpindahan PNS.

Permasalahan yang sedang dihadapi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat banyak sekali kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem sekarang ini diantaranya adalah banyaknya jumlah data usulan pindah yang dapat mengakibatkan tercecernya data usulan pindah bahkan dapat hilang sebelum diolah menjadi Keputusan karena data tersebut memerlukan verifikasi dan kurangnya efektifitas dan efisiensi dalam proses pengolahan data. Untuk saat ini masing-masing pengelolaan data yang dihasilkan masih menggunakan sistem yang konvensional atau dengan kata lain masih manual (menggunakan fasilitas *mail merge* pada *microsoft word*), dalam hal ini belum ada sistem yang terkomputerisasi yang membantu untuk mengolah data secara terkomputerisasi, serta besarnya kemungkinan kesalahan pengolahan data yang disebabkan oleh *human error* dalam proses pengolahan data dikarenakan belum adanya *database* dan juga pencarian data perpindahan, pelaporan untuk laporan kepada pimpinan, sebagai alat untuk mengumpulkan bahan untuk membuat kebijakan, bahan penetapan program kerja dan rencana pembangunan kepegawaian Daerah, pembinaan dan pengawasan manajemen kepegawaian di Kabupaten/Kota Jawa Barat dan untuk bahan perumusan rencana strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Berdasarkan permasalahan diatas dapat di ambil solusi alternatif yaitu dengan cara mencoba membangun suatu sistem pengolahan data perpindahan yang terkomputerisasi untuk menangani permasalahan dalam hal pengolahan data perpindahan berbasis *web* untuk memudahkan pencarian data perpindahan, pelaporan untuk laporan kepada pimpinan, sebagai alat untuk mengumpulkan bahan untuk membuat kebijakan, bahan penetapan program kerja dan rencana pembangunan kepegawaian Daerah, pembinaan dan pengawasan manajemen kepegawaian di Kabupaten/Kota dan untuk bahan perumusan rencana strategis

dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Untuk itu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat menginginkan sistem informasi baru yang akan dirancang adalah dengan menggunakan aplikasi PHP dan database MySQL Diharapkan dengan sistem informasi yang baru dapat mendukung kinerja instansi secara menyeluruh.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul " **SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERPINDAHAN PEGAWAI NON JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DAN KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**".

1.2. Identifikasi Dan Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka dapat di identifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dan dirumuskan seperti berikut ini :

1.2.1. Identifikasi Masalah

Kebijakan pembaharuan manajemen pegawai negeri sipil diarahkan untuk menciptakan sistem manajemen pegawai negeri sipil yang efektif dan rasional sehingga dapat membangun sosok pegawai negeri sipil yang profesional, berkinerja tinggi, berbudi luhur dan sejahteran. Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi yang begitu cepat sehingga menuntut Pegawai Negeri Sipil dan Organisasi untuk terus menggali keahlian lagi yang maksimal.

Berdasarkan Latar Belakang yang diuraikan di atas serta pengamatan dan analisa mengenai sistem yang sedang berjalan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat maka Penulis dapat merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Belum adanya sistem informasi yang mendukung manajemen perpindahan pegawai non jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

2. Belum tersedianya database untuk memudahkan pengelolaan data perpindahan pegawai.
3. Belum efektifnya pelaporan perpindahan pegawai, sehingga dapat menghambat bahan perumusan kebijakan rencana strategis.

1.2.2. Rumusan Masalah

Adapun penjelasan tentang rumusan masalah, berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah, yaitu :

1. Bagaimana sistem yang berjalan pada pelaksanaan fasilitasi dan pengolahan data perpindahan dan administrasi kepegawaian.
2. Bagaimana perancangan sistem informasi manajemen perpindahan pegawai non jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Bagaimana implementasi sistem informasi manajemen perpindahan pegawai non jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud

Adapun maksud dilaksanakannya penelitian ini adalah

1. Dalam rangka reformasi birokrasi di lingkugan Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan merancang dan mengimplementasikan sistem informasi manajemen perpindahan pegawai non jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Memberikan solusi dari permasalahan yang ada pada sub bidang perpindahan dan administrasi kepegawaian.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui sistem yang berjalan pada pelaksanaan fasilitasi dan pengolahan data perpindahan dan administrasi kepegawaian.
2. Untuk merancang sistem informasi manajemen perpindahan pegawai non jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk implementasi sistem informasi manajemen perpindahan pegawai non jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dilaksanakannya penelitian ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu kegunaan praktis dan akademis.

1.4.1. Kegunaan Praktis

Diharapkan dengan penelitian ini, penulis dapat membantu memecahkan kendala yang dihadapi oleh sub bidang perpindahan dan administrasi kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.4.2. Kegunaan Akademis

1. Pengembangan ilmu

   Sebagai pengembangan ilmu yang diperoleh pada program studi sistem informasi khususnya dalam sistem informasi manajemen perpindahan pegawai non jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Bagi peneliti lain

   Laporan Skripsi ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi atau bahan masukkan untuk kegiatan ilmiah atau penelitian bagi pihak lain yang juga sedang melakukan penelitian atau sebagai bahan perbandingan.

3. Bagi penulis/peneliti

   Kegunaan yang dapat diperoleh bagi peneliti adalah menambah pengetahuan mengenai sistem informasi manajemen perpindahan pegawai non jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. dan pengalaman bagaimana sesungguhnya membuat sebuah perangkat lunak yang berguna bagi pihak lain yang membutuhkan.

1.5. Pembatasan Masalah

Agar lebih terarah dan sesuai dengan yang diharapkan serta terorganisasi dengan baik perlu adanya batasan perancangan sistem yang akan dibuat. Adapun batasan perancangannya adalah sebagai berikut:

1. Sistem informasi manajemen perpindahan pegawai non jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dibangun untuk mengelola dan mengolah data perpindahan pegawai non jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten/Kota ke Provinsi atau dari Provinsi ke Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, dan perpindahan PNS antar Daerah antar Provinsi dan perpindahan PNS Pusat ke Daerah.
2. Sistem informasi manajemen perpindahan pegawai non jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat tidak membahas perpindahan PNS Daerah ke Pusat dan dari Kabupaten/Kota atau Provinsi Jawa Barat ke Daerah atau Provinsi lain.
3. Kelola user dan Kelola Pejabat hanya dilakukan oleh kepala sub bidang perpindahan dan administrasi kepegawaian.
4. Sistem ini hanya mengasilkan produk Keputusan Perpindahan Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten/Kota ke Provinsi atau dari Provinsi ke Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Surat Permohonn Penetapan

Perpindahan PNS antar Daerah antar Provinsi dan perpindahan PNS Pusat ke Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.6. Lokasi dan Waktu Penelitian

1.6.1. Lokasi Penelitian

Adapun tempat penelitian yang dilakukan yaitu di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat pada Bidang Mutasi dan Administrasi Kepegawaian sub bidang perpindahan dan administrasi kepegawaian yang bertempat di Jl. Ternate No 2 Bandung 40115.

1.6.2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan mulai tanggal 04 Maret 2013 dengan waktu penelitian kurang lebih selama 4 bulan

Tabel 1.1. Jadwal Penelitian

NO	KEGIATAN	TAHUN 2013															
		MARET				APRIL				MEI				JUNI			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengumpulan Data																
	a. Observasi																
	b. Wawancara																
	c. Studi Kepustakaan																
2	Analisis Kebutuhan																
	a. Wawancara																
	b. Observasi																
3	Membuat Prototype																
	a. Analisa *Business Rule*																
	b. Skema Database																
	c. Perancangan I/O																
4	Implementasi																
	a. Desain Program																
	b. Pengkodingan																
5	Uji Coba Program																
6	Evaluasi Sistem																
7	Membuat Laporan																